

Pengaruh Kesetaraan Gender dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Delvio Fortsty Ananda¹, Joan Marta²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Korespondensi: delvioananda23@gmail.com joan@fe.unp.ac.id

Abstract:

Info Artikel

Diterima:

20 Agustus 2026

Disetujui:

1 September 2026

Terbit daring:

17 September 2026

DOI: -

Sitasi:

Ananda, Delvio, F. & Marta, J. (2026). Pengaruh Kesetaraan Gender dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Educational inequality in Indonesia is closely tied to socioeconomic conditions and uneven regional development. This study aims to analyze the independent and collective impacts of gender parity, poverty levels, government educational expenditure, per capita GRDP, and income inequality on educational disparities across Indonesia. Using a quantitative approach combining descriptive and associative designs, the study analyzes panel data from 34 provinces over 2020–2024 (170 observations), with total sampling. Educational inequality was measured using the Education Gini Coefficient, while gender equality was measured using the Gender Development Index, poverty using the percentage of the poor population, government expenditure using per capita education expenditure, GRDP using GRDP per capita, and income inequality using the Gini Ratio. Through REM shows poverty significantly worsens educational disparity, while gender equality and education expenditure act as significant equalizers. The effects of per capita GRDP, though negative, remain insignificant at a 5% margin, similar to the Gini Ratio which yields no substantial impact. Simultaneously, all independent variables significantly impact educational inequality, with an overall R-squared of 53.11%. The findings indicate that increasing gender equality and education expenditure, as well as reducing poverty, are associated with efforts to reduce educational inequality across provinces in Indonesia.

Keywords: Gender Equality; Poverty; Educational Inequality; Education Expenditure; Indonesia

Abstrak:

Ketimpangan pendidikan di Indonesia masih menjadi persoalan yang berhubungan erat dengan perbedaan kondisi sosial ekonomi dan pembangunan antarwilayah. Penelitian ini menguji pengaruh kesetaraan gender, kemiskinan, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, PDRB per kapita, dan ketimpangan pendapatan terhadap disparitas pendidikan tersebut secara parsial maupun simultan.. Penelitian memanfaatkan himpunan data panel yang mencakup 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024, terdiri dari 170 observasi, dengan menggunakan teknik *total sampling*. Ketimpangan pendidikan diukur menggunakan Koefisien Gini Pendidikan, sedangkan kesetaraan gender diukur menggunakan Indeks Pembangunan Gender, kemiskinan menggunakan persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah menggunakan belanja pendidikan per kapita, PDRB menggunakan PDRB per kapita, dan ketimpangan pendapatan menggunakan Gini Ratio. Berdasarkan regresi data panel dengan Random Effect Model (REM), penelitian menemukan bahwa kesetaraan gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan, sedangkan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan juga berpengaruh negatif dan signifikan. PDRB per kapita dan Rasio Gini ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik pada batas 5%. Pengujian secara serentak mengonfirmasi bahwa seluruh variabel bebas secara kolektif memengaruhi ketimpangan pendidikan dengan daya jelaskan (R-kuadrat) mencapai 53,11 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender dan belanja pendidikan serta penurunan kemiskinan berkaitan dengan upaya mengurangi ketimpangan pendidikan antarprovinsi di Indonesia

Kata Kunci: Kesetaraan Gender; Kemiskinan; Ketimpangan Pendidikan; Belanja Pendidikan; Indonesia

Kode Klasifikasi JEL: I24, I25, J16, I32

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental sekaligus landasan utama pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Menurut Todaro dan Smith (2011), pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) keempat yang menekankan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua. Namun, manfaat pendidikan tidak dapat dirasakan secara optimal apabila akses dan capaian pendidikan belum terdistribusi secara merata. Di Indonesia, peningkatan akses pendidikan dalam beberapa tahun terakhir masih disertai persoalan ketimpangan antarwilayah, antarkelompok sosial, dan antargender. Ketimpangan pendidikan dapat tercermin melalui perbedaan capaian pendidikan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), serta ukuran ketimpangan pendidikan lainnya.

Meskipun indikator pendidikan nasional menunjukkan tren perbaikan, laju pertumbuhannya masih tergolong lambat. Berdasarkan data BPS, Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami peningkatan dari 13,08 tahun pada 2021 menjadi 13,30 tahun pada 2025, sedangkan RLS meningkat dari 8,54 tahun menjadi 9,07 tahun pada periode yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara nasional terdapat peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan, tetapi rata-rata pendidikan yang telah ditempuh penduduk masih berada pada tingkat pendidikan menengah pertama. Dengan demikian, peningkatan indikator pendidikan secara nasional belum secara otomatis menunjukkan pemerataan capaian pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Ketimpangan tersebut juga terlihat dari perbedaan partisipasi pendidikan antarprovinsi. Perbedaan kondisi wilayah menyebabkan kesempatan memperoleh pendidikan tidak seragam, terutama antara wilayah yang memiliki fasilitas dan kondisi sosial ekonomi lebih baik dengan wilayah yang masih menghadapi keterbatasan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masalah ketimpangan pendidikan bukan sekadar persoalan ketersediaan fasilitas sekolah, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial-ekonomi masyarakat serta karakteristik pembangunan daerah masing-masing.

Salah satu determinan utama yang berkaitan erat dengan ketimpangan pendidikan adalah tingkat kemiskinan. Keterbatasan sumber daya finansial rumah tangga miskin dapat membatasi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Tingginya biaya kesempatan juga dapat mendorong sebagian anak dari keluarga miskin untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah (Utami et al., 2024). Selain itu, ketimpangan infrastruktur dan layanan publik antarwilayah dapat semakin memperbesar disparitas akses pendidikan (Utomo et al., 2011). Dalam jangka panjang, rendahnya pendidikan dan aspirasi orang tua dapat memperkuat transmisi kemiskinan antargenerasi (Islam, 2002; Widyanti & Wenefrida, 2008). Dengan demikian, secara teoritis semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar pula potensi ketimpangan pendidikan.

Fenomena tersebut terlihat dalam kondisi kemiskinan antarprovinsi di Indonesia. Selama 2020–2024, rata-rata persentase penduduk miskin 34 provinsi mengalami perubahan dari 10,43% pada 2020 menjadi 9,78% pada 2024. Namun, kesenjangan antarwilayah masih besar. Papua memiliki rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 26,50%, diikuti Papua Barat 20,97%, Nusa Tenggara Timur 20,28%, Maluku

16,75%, dan Gorontalo 15,19%. Sebaliknya, Bali memiliki rata-rata kemiskinan terendah sebesar 4,23%, diikuti Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Tengah. Provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi tersebut juga memiliki kecenderungan berada pada kelompok dengan ketimpangan pendidikan yang lebih tinggi.

Selain kemiskinan, kesetaraan gender merupakan faktor penting dalam pemerataan pendidikan. Dalam rumah tangga miskin, keterbatasan ekonomi menyebabkan keluarga harus menentukan prioritas dalam alokasi sumber daya pendidikan. Bias gender dapat menyebabkan anak perempuan menjadi pihak yang lebih dirugikan, khususnya di wilayah yang menghadapi kemiskinan dan ketimpangan gender tinggi. Kondisi tersebut menciptakan beban ganda bagi anak perempuan dari keluarga miskin karena menghadapi hambatan ekonomi sekaligus hambatan sosial dalam memperoleh pendidikan (Baloch et al., 2017).

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia secara nasional mengalami perbaikan. Rata-rata IPG 34 provinsi meningkat dari 91,06 pada 2020 menjadi 91,85 pada 2024. Pada periode yang sama, rentang nilai minimum dan maksimum serta standar deviasi juga menurun, yang menunjukkan bahwa kesenjangan capaian pembangunan gender antarwilayah berangsur mengecil. Namun, perbedaan antarprovinsi masih terlihat. DKI Jakarta memiliki rata-rata IPG tertinggi sebesar 95,04 pada 2020–2024, sedangkan Papua memiliki rata-rata terendah sebesar 81,62. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kesetaraan gender secara nasional belum menghilangkan perbedaan antarwilayah.

Hubungan antara gender dan pendidikan telah menjadi perhatian penelitian terdahulu. Thomas et al. (2001) menunjukkan adanya hubungan positif antara kesenjangan gender dalam pencapaian pendidikan dan ketimpangan pendidikan. Baloch et al. (2017) juga menunjukkan bahwa perempuan, khususnya dalam kondisi kemiskinan, cenderung menghadapi kesempatan pendidikan yang lebih rendah. Sementara itu, penelitian mengenai kemiskinan dan ketimpangan pendidikan telah dilakukan oleh aderhamzahhsarsumllloh dan Muhammad (2024). Studi Aderempas et al. (2025) menyimpulkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan gender secara konsisten memperlebar kesenjangan pendidikan, terutama di wilayah tertinggal dengan keterbatasan infrastruktur. Sebaliknya, Yusuf dan Haanif (2024) menunjukkan bahwa intervensi anggaran pemerintah di sektor pendidikan dapat memiliki pengaruh lebih dominan terhadap pemerataan akses dibandingkan faktor ekonomi rumah tangga semata. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil empiris yang menjadi salah satu celah penelitian.

Selain itu, penelitian yang menguji secara simultan keterkaitan kesetaraan gender dan kemiskinan dalam kerangka ketimpangan pendidikan pada tingkat makro di Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, kedua faktor tersebut secara teoritis dapat saling berkaitan. Rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi menghadapi *trade-off* dalam alokasi sumber daya pendidikan yang dalam kondisi tertentu dapat memperkuat bias gender. Oleh karena itu, penelitian dengan cakupan provinsi diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai faktor penentu ketimpangan pendidikan.

Guna memperoleh estimasi hubungan yang lebih presisi, penelitian ini turut mempertimbangkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, PDRB per kapita, dan ketimpangan pendapatan sebagai variabel kontrol. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mencakup pembiayaan guru, fasilitas, bantuan pendidikan, pelatihan, dan subsidi, yang dapat menurunkan ketimpangan apabila dialokasikan secara merata. PDRB per kapita menggambarkan kinerja ekonomi dan tingkat kesejahteraan rata-rata suatu wilayah, sedangkan ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio dikontrol karena berkaitan dengan kemampuan kelompok masyarakat dalam membiayai pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kesetaraan gender dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendidikan di 34 provinsi Indonesia periode 2020–2024, dengan memasukkan belanja pendidikan pemerintah, PDRB per kapita, dan ketimpangan pendapatan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel untuk menangkap heterogenitas antarprovinsi sekaligus dinamika waktu, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan ketimpangan pendidikan di Indonesia serta implikasi kebijakan yang relevan bagi upaya pemerataan pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model deskriptif dan asosiatif guna menganalisis pengaruh kesetaraan gender serta kemiskinan terhadap ketimpangan pendidikan, dengan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, PDRB per kapita, dan ketimpangan pendapatan sebagai variabel kontrol. Analisis ini menerapkan data panel yang menggabungkan data *cross-section* dari 34 provinsi di Indonesia dengan data *time-series* kurun waktu 2020–2024, sehingga terkumpul sebanyak 170 titik observasi. Seluruh data bersumber dari instansi resmi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data IPG, tingkat kemiskinan, distribusi capaian pendidikan, dan Gini Ratio, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan untuk data alokasi belanja pendidikan pemerintah.

Ketimpangan pendidikan (*Edu_Ineq*) sebagai variabel dependen dihitung dengan Koefisien Gini Pendidikan yang dikembangkan Thomas et al. (2001), berdasarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dengan lima kategori lama sekolah (0, 6, 9, 12, dan 16 tahun) yang mengacu pada sistem wajib belajar 12 tahun di Indonesia dan penyesuaian dari Senadza (2012). Nilai koefisien berada antara 0 (merata sempurna) sampai dengan 1 (sangat timpang). Berikut adalah rumusan Gini pendidikan menurut Thomas et al. (2001):

$$Edu\ Ineq = \frac{1}{\mu} \sum_{i=2}^7 \sum_{j=1}^{i-1} P_i |y_i - y_j| P_j \quad (1)$$

di mana μ melambangkan rata-rata lama sekolah di suatu provinsi; P_i dan P_j adalah proporsi populasi pada kategori lama sekolah tertentu; y_i dan y_j menunjukkan jumlah tahun sekolah untuk kategori jenjang pendidikan ke- i dan ke- j ; serta n merupakan total kategori pencapaian pendidikan yang dalam riset ini ditetapkan sebanyak 5 kategori dengan sedikit penyesuaian dari studi yang dilakukan oleh Senadza (2012).

Berdasarkan kebijakan wajib belajar 12 tahun di Indonesia, kelima kategori dalam penelitian ini diadaptasi sedemikian rupa. Adapun rumus yang diterapkan dalam perhitungan lama sekolah untuk setiap kategori dari kelima kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

Tidak bersekolah/ belum tamat SD	: $y_1 = y_1 + 0 = 0$ tahun
Tamat SD	: $y_2 = y_1 + SD = 6$ tahun
Tamat SMP	: $y_3 = y_2 + SMP = 9$ tahun

Tamat SMA : $y_4 = y_2 + \text{SMA} = 12$ tahun
Tamat Universitas : $y_5 = y_2 + \text{Universitas} = 16$ tahun
dengan y_i menyatakan jumlah tahun bersekolah pada kategori tingkat ke- i (untuk $i = 1, 2, \dots, 5$)

Kesetaraan gender (Gender_Eq) diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Kemiskinan (Poverty) diukur dengan persentase penduduk miskin (Po). Sementara itu, alokasi belanja pendidikan (Edu_Spend) dan PDRB per kapita (GRDP) dihitung dari realisasi per kapita yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (ln), dan ketimpangan pendapatan (Gini) dievaluasi berdasarkan Rasio Gini tingkat provinsi.

Persamaan model regresi data panel dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Edu_Ineq}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Gender_Eq}_{it} + \beta_2 \text{Poverty}_{it} + \beta_3 \ln \text{Edu_Spend}_{it} + \beta_4 \ln \text{GRDP}_{it} + \beta_5 \text{Gini}_{it} + \varepsilon_{it} \tag{2}$$

dengan i menyatakan provinsi (cross section) dan t menyatakan tahun (time series). Pemilihan model estimasi terbaik antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) dilakukan melalui tiga uji statistik: Uji Chow untuk memilih antara CEM dan FEM, Uji Hausman untuk memilih antara FEM dan REM, serta Uji Lagrange Multiplier (LM) Breusch-Pagan untuk memilih antara CEM dan REM (Baltagi, 2005; Caraka, 2017). Setelah model terpilih, pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model memenuhi standar BLUE, yang kemudian diteruskan dengan uji Wald Chi-Square (simultan), uji z (parsial), serta perhitungan R^2 untuk mengetahui besaran variasi variabel dependen yang mampu dijelaskan. Seluruh analisis data ini dioperasikan melalui perangkat lunak Stata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Gambaran umum kondisi kelima variabel penelitian pada 34 provinsi di Indonesia selama 2020–2024 disajikan pada Tabel 1. Rata-rata ketimpangan pendidikan berada pada kisaran 0,27–0,29, sempat meningkat pada masa pandemi Covid-19 (2020–2022) sebelum menurun kembali pada 2023–2024, seiring pulihnya rata-rata lama sekolah penduduk. Papua secara konsisten mencatat ketimpangan pendidikan tertinggi (rata-rata 0,4869), jauh di atas DKI Jakarta yang terendah (0,1721). Pola yang berkebalikan ditemukan pada IPG, yang meningkat stabil dari 90,23 pada 2020 menjadi 91,41 pada 2024, dengan Papua dan Papua Barat berada pada posisi terendah, sementara DKI Jakarta dan DI Yogyakarta tertinggi. Korelasi sederhana antara IPG dan ketimpangan pendidikan antarprovinsi tercatat negatif dan cukup kuat ($r \approx -0,52$), mengindikasikan bahwa provinsi dengan kesetaraan gender rendah umumnya memiliki ketimpangan pendidikan yang lebih tinggi, contohnya Papua sebagai kasus paling ekstrem akibat kombinasi keterbatasan geografis, infrastruktur, dan dampak pemekaran wilayah pascatahun 2022.

Tingkat kemiskinan rata-rata menurun dari 10,43% (2020) menjadi 9,78% (2024), dengan Papua dan Papua Barat tetap tercatat sebagai provinsi termiskin, berkebalikan dengan Bali dan Kalimantan Selatan yang mencatat tingkat kemiskinan terendah. Belanja pendidikan per kapita dan PDRB per kapita menunjukkan variasi antarprovinsi yang lebar, dengan provinsi kaya sumber daya alam seperti Kalimantan Timur mencatat PDRB per kapita tinggi namun tidak selalu diikuti kesetaraan gender maupun pemerataan pendidikan yang baik. Sementara itu, urutan provinsi berdasarkan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) berbeda signifikan dari urutan ketimpangan pendidikan, dengan DI Yogyakarta dan DKI Jakarta justru mencatat Gini Ratio tertinggi meski ketimpangan pendidikannya terendah, menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan dan pemerataan pendapatan merupakan dua persoalan yang berbeda.

Tabel 1
Ringkasan Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (34 Provinsi, 2020–2024)

Variabel	Rata-rata	Minimum	Maksimum	Std. Deviasi
----------	-----------	---------	----------	--------------

Ketimpangan Pendidikan (indeks 0–1)	0,2799	0,1645	0,5154	0,0572
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,79	79,59	95,56	3,14
Kemiskinan / Po (%)	10,26	3,78	26,86	5,28
Belanja Pendidikan per Kapita (ribu Rp)	662,5	145,4	2.337,4 ^a	340,0
PDRB per Kapita (juta Rp)	45,73	12,96	201,33	34,50
Gini Ratio (indeks 0–1)	0,345	0,236	0,449	0,0436

^a Nilai maksimum belanja pendidikan per kapita tercatat pada 2024; dalam model regresi, variabel ini ditransformasikan ke bentuk logaritma natural untuk mengurangi pengaruh sebaran yang menjulur ke kanan. Sumber: BPS & DJPK Kemenkeu, 2020–2024 (data diolah)

Penentuan model estimasi data panel dilakukan melalui 3 pengujian spesifikasi yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM), sebagaimana dirangkum pada Tabel 2. Berdasarkan Uji Chow, diperoleh nilai F sebesar 37,52 ($p = 0,000$), sehingga terpilih FEM dibandingkan CEM. Uji LM mencatat nilai Chibar² senilai 255,89 ($p = 0,000$), sehingga REM lebih tepat dibandingkan CEM. Namun, Uji Hausman menunjukkan nilai Chi² sebesar 3,95 dengan p -value 0,5564 ($p > 0,05$), yang berarti H_0 diterima dan REM dipilih sebagai model terbaik dibandingkan FEM. Oleh karena itu, seluruh estimasi dalam studi ini mengandalkan Random Effect Model.

Tabel 2

Hasil Pengujian Pemilihan Model Data Panel

Metode Pengujian	Nilai Statistik	Nilai Prob.	Keputusan
Uji Chow	$F(33, 131) = 37,52$	0,0000	H_0 ditolak (FEM lebih tepat dari CEM)
Uji Hausman	$\text{Chi}^2(5) = 3,95$	0,5564	H_0 diterima (REM lebih tepat dari FEM)
Uji LM	$\text{Chibar}^2(01) = 255,89$	0,0000	H_0 ditolak (REM lebih tepat dari CEM)

Sumber: Hasil olahan data Stata (2026).

Tabel 3 menyajikan hasil estimasi REM. Nilai *overall R-squared* sebesar 0,5311 mengindikasikan bahwa 53,11 persen variasi ketimpangan pendidikan antarprovinsi dijelaskan secara bersamaan oleh kelima variabel penelitian. Berdasarkan uji simultan (*Wald Chi-Square*), diperoleh nilai 64,04 ($p = 0,000$), yang membuktikan bahwa seluruh variabel bebas secara kolektif berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendidikan. Persamaan regresi yang dihasilkan yakni:

$$\text{Edu_Ineq}_{it} = 1,325425 - 0,0062667 \text{Gender_Eq}_{it} + 0,0032484 \text{Poverty}_{it} - 0,0234082 \ln \text{Edu_Spend}_{it} - 0,0207999 \ln \text{GRDP}_{it} + 0,0604596 \text{Gini}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

Tabel 3

Hasil Estimasi Regresi Data Panel (Random Effect Model)

Variabel	Koefisien	Std. Error	z	Prob.	Keterangan
----------	-----------	------------	---	-------	------------

Gender_Eq	-0,0062667	0,0015866	-3,95	0,000	Signifikan pada 1%
Poverty	0,0032484	0,0013677	2,38	0,018	Signifikan pada 5%
ln_Edu_Spend	-0,0234082	0,0047524	-4,93	0,000	Signifikan pada 1%
ln_GRDP	-0,0207999	0,0109729	-1,90	0,058	Signifikan pada 10%
Gini Ratio	0,0604596	0,0999320	0,61	0,545	Tidak signifikan
Konstanta (_cons)	1,325425	0,2066275	6,41	0,000	—

Jumlah observasi = 170; jumlah provinsi = 34; $R\text{-sq within} = 0,1731$; $R\text{-sq between} = 0,5513$; $R\text{-sq overall} = 0,5311$; $\text{Wald } \chi^2(5) = 64,04$; $\text{Prob} > \chi^2 = 0,0000$. Nilai kolom Prob. adalah $P > |z|$.

Sumber: Hasil olahan data Stata (2026).

Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Ketimpangan Pendidikan

Berdasarkan hasil estimasi, Indeks Pembangunan Gender berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ketimpangan pendidikan (koefisien -0,0062667; $p = 0,000$), yang berarti semakin tinggi kesetaraan gender suatu provinsi, semakin rendah ketimpangan pendidikannya. Temuan ini mendukung Human Capital Theory (Becker, 1965) mengenai pentingnya pemerataan investasi pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali perempuan. Penyempitan disparitas pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki mendorong distribusi pendidikan yang lebih inklusif dan merata, serta terhindar dari konsentrasi pada kelompok tertentu. Temuan ini selaras dengan studi lintas negara oleh Baloch et al. (2017) pada studi lintas negara, serta Yuniar dan Yuniasih (2022) dan Setyadi (2022) pada konteks Indonesia, yang seluruhnya menunjukkan bahwa peningkatan kesetaraan gender berkaitan dengan penurunan ketimpangan pendidikan. Konsistensi arah pengaruh ini memperkuat kesimpulan bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu determinan utama pemerataan pendidikan, baik pada konteks Indonesia maupun pembangunan secara lebih luas.

Pengaruh Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendidikan

Kemiskinan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendidikan (koefisien 0,0032484; $p = 0,018$), artinya semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu provinsi, semakin timpang pula sebaran capaian pendidikannya. Temuan ini sejalan dengan teori permintaan pendidikan dalam kerangka Human Capital Theory (Becker, 1965) serta penjelasan Checchi (2006) mengenai peran family background, di mana rumah tangga miskin menghadapi kendala biaya langsung maupun opportunity cost yang mendorong anak untuk bekerja alih-alih bersekolah, sehingga meningkatkan risiko putus sekolah. Hasil deskriptif memperkuat temuan ini, di mana provinsi termiskin seperti Papua dan Papua Barat juga merupakan provinsi yang ketimpangan pendidikannya tertinggi. Temuan ini konsisten dengan Maharani dkk. (2024) yang mengindikasikan bahwa kemiskinan berdampak langsung terhadap rendahnya mutu serta keberlanjutan partisipasi pendidikan anak Indonesia, serta Setyadi (2022) yang menemukan pengaruh positif persentase penduduk miskin terhadap ketimpangan pendidikan antarwilayah.

Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendidikan

Belanja pendidikan pemerintah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendidikan (koefisien -0,0234082; $p = 0,000$), bahkan memiliki koefisien absolut terbesar di antara seluruh variabel dalam model, melampaui Indeks Pembangunan Gender (-0,0062667) maupun kemiskinan (0,0032484), sehingga menjadi determinan yang secara statistik paling kuat kaitannya dengan pemerataan capaian pendidikan antarprovinsi. Hasil ini sejalan dengan Becker (1965) mengenai investasi human capital serta Psacharopoulos dan Patrinos (2004) tentang tingginya return sosial pengeluaran publik pada sektor pendidikan bagi kelompok

berpenghasilan rendah, dan konsisten dengan Hamzah dkk. (2017), Setyadi (2022), serta Tan dan Mingat (1992). Karena variabel ini dimasukkan dalam bentuk logaritma natural (model log-level), koefisiennya perlu dibaca sebagai berikut: setiap kenaikan belanja pendidikan per kapita sebesar 1 persen berkaitan dengan penurunan indeks ketimpangan pendidikan sekitar 0,000234 poin (*ceteris paribus*) — pengaruh yang signifikan namun relatif kecil secara nominal. Muhammad dan Wiguna (2023) mengingatkan bahwa besaran belanja pendidikan antarprovinsi masih sangat dipengaruhi kapasitas fiskal daerah, sehingga peningkatan belanja perlu diarahkan tepat sasaran, misalnya melalui skema transfer fiskal berbasis kebutuhan (*needs-based grants*), disertai penguatan efektivitas dan pemerataan alokasi anggaran, bukan sekadar menaikkan besaran nominalnya.

Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Ketimpangan Pendidikan

PDRB per kapita memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendidikan, namun hanya signifikan pada taraf 10 persen (koefisien -0,0207999; $p = 0,058$), sedangkan Gini Ratio tidak berpengaruh signifikan (koefisien 0,0604596; $p = 0,545$). Secara teoretis, pertumbuhan ekonomi seharusnya mendorong pemerataan pendidikan karena memperluas basis fiskal dan daya beli masyarakat (Todaro & Smith, 2011), tetapi lemahnya pengaruh PDRB per kapita dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa kemakmuran ekonomi agregat belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pemerataan pendidikan, sebagaimana tercermin pada provinsi kaya SDA contohnya Kalimantan Timur yang PDRB-nya tinggi tanpa diikuti pemerataan pendidikan dan gender yang baik. Sementara itu, tidak signifikannya Gini Ratio mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan antarpenduduk lebih banyak dibentuk oleh struktur pasar kerja dan kepemilikan aset (De Gregorio & Lee, 2002) yang tidak selalu berhubungan langsung dengan distribusi capaian pendidikan. Hasil ini memperlihatkan bahwa disparitas pendidikan dan kesenjangan pendapatan adalah persoalan yang tidak identik, sehingga penanganannya memerlukan jalur kebijakan tersendiri.

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Ketimpangan Pendidikan

Berdasarkan hasil estimasi, *Gini Ratio* sebagai proksi ketimpangan pendapatan memiliki koefisien 0,0604596 ($p = 0,545$). Karena nilai probabilitasnya melampaui 0,05, faktor ketimpangan pendapatan dinyatakan tidak berdampak nyata terhadap disparitas pendidikan. Koefisien positif hanya menunjukkan arah hubungan dalam model dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai pengaruh yang signifikan secara statistik. Temuan ini menggambarkan lebar atau sempitnya kesenjangan pendapatan antarpenduduk dalam suatu provinsi belum tentu secara langsung menentukan tingkat ketimpangan capaian pendidikan. Secara garis besar, penelitian ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender, kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendidikan. Kesetaraan gender dan belanja pendidikan memiliki arah negatif, sedangkan kemiskinan memiliki arah positif. Sementara itu, PDRB per kapita dan Gini Ratio tidak menunjukkan pengaruh signifikan pada taraf 5 persen. Secara bersama-sama, seluruh variabel dalam model terbukti signifikan (*Wald Chi – Square* = 64,04; $p = 0,0000$). Nilai *overall R-squared* 0,5311 menyatakannya mampu menerangkan 53,11 persen variasi ketimpangan pendidikan antarwilayah, sedangkan sisanya 46,89 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan riset ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesetaraan gender dan kemiskinan merupakan determinan utama ketimpangan pendidikan di Indonesia antara tahun 2020 hingga 2024. Kesetaraan gender, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender, terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan, sehingga peningkatan kesetaraan gender di suatu provinsi akan diikuti oleh capaian pendidikan yang semakin merata. Sebaliknya, variabel kemiskinan menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa kendala ekonomi pada rumah tangga miskin menjadi hambatan struktural bagi pemerataan akses dan penuntasan pendidikan. Belanja pendidikan pemerintah daerah juga terbukti berpengaruh negatif dan signifikan, menegaskan peran penting kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pemerataan

pendidikan, sementara PDRB per kapita hanya berpengaruh pada taraf signifikansi 10 persen dan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) tidak berpengaruh signifikan, yang mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan dan pemerataan pendidikan merupakan dua persoalan yang tidak dapat saling menggantikan. Secara simultan, kelima variabel dalam model mampu menjelaskan sekitar 53,11 persen variasi ketimpangan pendidikan antarprovinsi, adapun sisa variasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti kualitas infrastruktur pendidikan, rasio guru-murid, atau kondisi geografis wilayah.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya penguatan program kesetaraan gender dan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dengan kebijakan pendidikan, seperti perluasan akses pendidikan dan lapangan kerja bagi perempuan serta program bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, khususnya di provinsi-provinsi timur Indonesia dengan IPG rendah dan kemiskinan tinggi seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan efektivitas dan pemerataan alokasi belanja pendidikan, tidak hanya besaran nominalnya, serta memastikan hasil pertumbuhan ekonomi terdistribusi secara lebih merata melalui kebijakan fiskal yang inklusif. Penelitian berikutnya, disarankan agar memasukkan faktor pendukung lain seperti kualitas fasilitas dan rasio guru-siswa, memperluas periode pengamatan, serta mengeksplorasi kemungkinan hubungan non-linear antara ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendidikan yang belum terkonfirmasi signifikan dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulloh, E., & Muhammad, Y. (2024). Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial*, 02. <https://miftahul-ulum.or.id/ojs/index.php/jps/article/view/175/93>
- Aderempas, T., Lukman, A., & Emmi, K. H. (2025). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan Di Kabupaten Kepahiang* [IAIN Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/9405/1/Fulltext.pdf>
- Baloch, A., Noor, Z. M., Habibullah, M. S., & Bani, Y. (2017). The impact of gender equality on education inequality: A global analysis based on GMM dynamic panel estimation. *International Journal of Economics and Management*, 11(S3), 691–714.
- Becker. (1965). A Theory of the Allocation of Time. *The Economic Journal*, Vol. 75, No. 299.
- Cecchi, D. (2006). *The economics of education: Human capital, family background and inequality*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511492280>
- Hamzah, F., Rosyadi, R., & Kartika, M. (2017). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, gender gap dan pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(2), 77–97. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i2.22985>
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2004). Returns to investment in education: A further update. *Education Economics*, 12(2), 111–134. <https://doi.org/10.1080/0964529042000239140>
- Maharani, C., Ningrum, D. A., Fatmawati, A. E., & Fadilla, A. (2024). Dampak kemiskinan terhadap kualitas pendidikan anak di Indonesia: Rekomendasi kebijakan yang efektif. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.199>
- Senadza, B. (2012). Education inequality in Ghana: Gender and spatial dimensions. *Journal of Economic Studies*, 39(6), 724–739. <https://doi.org/10.1108/01443581211274647>
- Setyadi, S. (2022). The impact of gender inequality and economic variables on education inequality: Panel data analysis. *Gorontalo Development Review*, 5(1), 36–48. <https://doi.org/10.32662/golder.v5i1.2021>
- Thomas, V., Wang, Y., & Fan, X. (2001). *Measuring education inequality: Gini coefficients of education*. World Bank.

- Utomo, B., Sucahya, P. K., & Utami, F. R. (2011). Priorities and realities: addressing the rich-poor gaps in health status and service access in Indonesia. *International Journal for Equity in Health* 2011 10:1, 10(1), 47-. <https://doi.org/10.1186/1475-9276-10-47>
- Widyanti, & Wenefrida. (2008). *Munich Personal RePEc Archive Multidimensional Poverty in Indonesia: Trends, Interventions and Lesson Learned*.
- Yuniar, A., & Yuniasih, A. F. (2022). Pengaruh kesetaraan gender terhadap ketimpangan capaian pendidikan di Indonesia tahun 2015–2019. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 116–130. <https://doi.org/10.21002/jepi.2022.07>
- Yusuf, A., Hanif, M., Pendidikan Islam, M., Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, F., & Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Affandy Yusuf, U. (2024). Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Ketimpangan Akses di Indonesia. In *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* (Vol. 2, Number 3). <https://jipipi.org/index.php/jipipi153>Situswebjurnal:<https://jipipi.org/index.php/jipipi>